KEPUTUSAN MAHAMAH KONSTITUSI (MK) ATAS KEMENANGAN BUPATI TERPILIH SABU
RAIJUA YANG TERBUKTI WARGA AMERIKA SERIKAT

Disusun Oleh:

NAMA : ASMA ANDRIA JAYA

NIM : 10200120193

KELAS : HTN-E

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2021

ABSTRAK

Kewarganegaraan adalah sebuah bentuk keanggotaan dalam sosial politik tertentu atau secara khusus yaitu negara, dengan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan dapat juga diartikan dengan segala jenis hubungan suatu negara yang dapat mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Asas kewarganegaraan ada 2 (dua), yaitu: asas kelahiran atau *ius soli* dan asas keturunan atau *ius sanguinis*. Selain asas-asas tersebut ada juga asas campuran, asas campuran adalah asas gabungan antara kelahiran atau *ius soli* dan asas keturunan atau *ius sanguinis*.

Dalam status kewarganegaraan seseorang terjadi apabila asas kewarganegaraan diterapkan dengan tegas dalam suatu negara, dapat mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi: *apatride*, *bipatride*, dan *multipatride*.

Montesquieu juga menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak boleh bertumpu pada satu organ, tetapi harus dipisahkan organ yang satu dengan organ yang lainnya. Menurut Bagir Manan wewenang adalah kekuasaan yang diberikan atau didapat berdasarkan hukum yang ekuivalen dengan *authority*. Dengan demikian, kekuasaan dapat diatasi sesuai dengan fungsi dan dapat dikontrol baik secara internal oleh lembaga-lembaga lain yang sederajat, maupun secara eksternal oleh rakyat sebagai konstituen nyata yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kewarganegaraan adalah sebuah bentuk keanggotaan dalam sosial politik tertentu atau secara khusus yaitu negara, dengan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut. Kewarganegaraan memiliki kesamaan dengan kebangsaan, tetapi memiliki perbedaan juga. Perbedaannya terletak pada hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan dan juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Kewarganegaraan ditandai dengan ikutnya warga berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Kewarganegaraan merupakan suatu bagian dari konsep kewargaan atau citizenship dalam bahasa Inggris. Dalam istilah Kebangsaan atau nationality adalah sebagai hukum internasional yang menunjuk kepada ikatan, ikatan seorang individu terhadap suatu negara yang memberi hak kepada suatu negara untuk mengatur dan melindungi kebangsaannya, walaupun orang tersebut berada diluar negeri.

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan dapat juga diartikan dengan segala jenis hubungan suatu negara yang dapat mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwil yang berhubungan dengan neagara.

Dalam sebuah kasus dalam pemilihan bupati, salah satu calon bupati yang terpilih terbukti merupakan warga negara asing (WNA), yaitu kewarganegaraan Amerika Serikat. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), ada 4 (empat), yaitu:

- Keputusan pertama, keputusan nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020.
- Keputusan kedua, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020.
- Keputusan ketiga, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly).
- Keputusan keempat, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2021.

1.2 MASALAH

Pemilihan bupati yang salah satu calonnya merupakan warga negara asing (WNA), yaitu warga negara amerika serikat.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Untuk mengetahui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan kasus tersebut.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini adalah metode penelitian yang strategi dalam penelitian untuk mengungkapkan kasus tertentu. Metode penelitian kualitatif pada umumnya, data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan baik melalui wawancara, observasi, partisipasi, atau dokumentasi. Untuk memperoleh informasi yang mendalam terhadap sebuah kasus, maka diperlukan seorang informan yang kompeten. Penelitian Negara dan Warga Negara kualitatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran material.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, karena metode ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kondisi dan keadaan. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian tentang kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kejadian pada masa sekarang.

2.2 Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

BAB III PEMBAHASAN

Setiap negara memiliki kebebasan menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan terdapat 2 (dua) pedoman, yaitu:¹

1. Asas kelahiran atau *ius soli*
Asas ini menentukan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahirannya.
2. Asas keturunan atau *ius sanguinis*
Asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan hubungan darah atau keturunan.

Selain kedua asas diatas, ada juga asas campuran. Asas campuran adalah asas yang menentukan lebih dari satu kewarganegaraan. Karena masing-masing negara menganut asas yang menguntungkan kepentingan politik, perbedaan asas ini jarang membawa sebuah kesulitan dalam hubungan internasional. Kesulitan-kesulitan ini sering membawa akibat seseorang memperoleh kewarganegaraan lebih dari satu dan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali.²

Dalam status kewarganegaraan seseorang terjadi apabila asas kewarganegaraan diterapkan dengan tegas dalam suatu negara, dapat mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi:³

1. Apatride adalah seseorang yang tidak mendapatkan kewarganegaraan yang disebabkan oleh orang yang lahir dalam sebuah negara yang menganut *ius sanguinis*.
2. Bipatride adalah seseorang yang akan mendapat dua kewarganegaraan, dan apabila seorang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut *ius sanguinis*, sedangkan ia terlahir dari suatu negara yang menganut *ius soli*.
3. Multipatride adalah seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan, seseorang penduduk yang tinggal di perbatasan antara 2 (dua) negara.

Di Indonesia sendiri menganut prinsip kewarganegaraan tunggal atau apatride. Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1946 yang berisikan tentang kewarganegaraan republik Indonesia yang lahir pada awal kemerdekaan Indonesia. Prinsip tersebut dapat terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam UU kewarganegaraan RI dan hukum kewarganegaraan, hukum kewarganegaraan adalah sebuah perangkat aturan yang berkenaan dengan segala yang bersangkutan dengan warganegara (*staatsburgers*). Dalam hal yang berhubungan dengan warga negara yaitu mengenai peraturan tentang kualifikasi dan kriteria

¹ Heri Herdiawato & Jumenta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm 58.

² Moh. Kusnadi & Bintan R. Saragih, op.cit., hlm. 110-111.

³ Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 262-263.

suatu warga negara, baik peraturan tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan, serta peraturan tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan.

Warga negara adalah penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Warga negara memiliki hak dan kewajiban.

Menurut UUD 1945 dalam pasal 26 warga negara adalah:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

Hak warga negara adalah suatu wewenang yang dimiliki warga negara guna melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut.

Kewajiban warga negara suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai dengan keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Kehidupan ketatanegaraan mengalami perubahan mendasar yang dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Perubahan tersebut tercatat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, semua itu dikarenakan fondasi dalam ketatanegaraan mengalami perubahan drastis, dan hampir meliputi berbagai bidang kehidupan.

Secara resmi Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dengan melalui sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat pada tahun 2001, menerima masuknya Mahkamah Konstitusi (MK) didalam Undang-Undang dasar tersebut.⁴

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) menandakan era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang awalnya tidak tersentuh oleh hukum, seperti masalah judicial review terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi (MK).⁵

⁴ Moh.Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 133.

⁵ Bambang Sutiyoso, 2009, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, h. 1.

Indonesia merupakan negara yang ke 78 yang telah membentuk Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan salah satu fenomena negara modern pada abad ke 20.⁶

Kehidupan ketatanegaraan mengalami perubahan mendasar yang dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Perubahan tersebut tercatat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, semua itu dikarenakan fondasi dalam ketatanegaraan mengalami perubahan drastis, dan hampir meliputi berbagai bidang kehidupan.

Secara resmi Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dengan melalui sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat pada tahun 2001, menerima masuknya Mahkamah Konstitusi (MK) didalam Undang-Undang dasar tersebut.⁷

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) menandakan era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang awalnya tidak tersentuh oleh hukum, seperti masalah judicial review terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi (MK).⁸

Indonesia merupakan negara yang ke 78 yang telah membentuk Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan salah satu fenomena negara modern pada abad ke 20.⁹

Kehidupan ketatanegaraan mengalami perubahan mendasar yang dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Perubahan tersebut tercatat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, semua itu dikarenakan fondasi dalam ketatanegaraan mengalami perubahan drastis, dan hampir meliputi berbagai bidang kehidupan.

Secara resmi Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dengan melalui sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat pada tahun 2001, menerima masuknya Mahkamah Konstitusi (MK) didalam Undang-Undang dasar tersebut.¹⁰

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) menandakan era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang awalnya tidak tersentuh oleh hukum, seperti masalah judicial review terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi (MK).¹¹

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 5.

⁷ Moh.Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 133.

⁸ Bambang Sutyoso, 2009, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, h. 1.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 5.

¹⁰ Moh.Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 133.

¹¹ Bambang Sutyoso, 2009, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, h. 1.

Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, dan Mahkamah Agung menetapkan masing-masing tiga calon hakim konstitusi.

Indonesia merupakan negara yang ke 78 yang telah membentuk Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan salah satu fenomena negara modern pada abad ke 20.¹²

C.F. strong menyatakan bahwa perbedaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis merupakan suatu hal yang sungguh-sungguh keliru, sebab tidak ada konstitusi yang benar-benar tertulis atau tidak tertulis.¹³ Perbedaan tersebut terkadang diperlukan, akan tetapi harus diingat bahwa konstitusi tertulis adalah konstitusi yang terdokumentasi,¹⁴ sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang terdokumentasi.¹⁵

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, dalam konstitusi terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur organ-organ suatu negara dan ruang lingkup kerjaan masing-masing.¹⁶

Pada pengakuan adanya konstitusi atau undang-undang dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dapat memberi suatu pembatasan moral pada kekuasaan pada badan legislatif. Konstitusi dapat berguna sebagai penentuan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai salah satu fungsi konstitusionalisme serta memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan.¹⁷

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 5.

¹³ C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia (Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form), diterjemahkan oleh SPA Teamwork (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, Juli 2004), hlm. 90.

¹⁴ Konstitusi tertulis yang dianggap tertua sampai saat ini adalah Konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah yang didirikan oleh konstitusi tersebut mulai berfungsi 4 Maret 1789. Ismail Suny, "Dwi Abad Konstitusi Amerika Serikat", Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun ke-XVI Februari 1986, hlm. 60. Konstitusi Amerika menetapkan banyak batas antara hukum federal dan negara bagian. Konstitusi tersebut juga membagi kekuasaan federal di antara cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari pemerintah (dengan demikian terdapat suatu pemisahan kekuasaan antara setiap cabang dan checks and balances). Michael Jay Friedman, "Sistem Hukum Amerika Serikat" dalam George Clack, et.al (ed.), Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat, (Biro Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat), hlm. 7.

¹⁵ C.F. Strong, Op.Cit., hlm. 92.

¹⁶ 5 C.F. Strong, Op.Cit., hlm. 21.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Amandemen Konstitusi", Op.Cit., hlm. 5.

Menurut Montesquieu, dalam teori trias politika, dapat membagi kekuasaan negara secara horizontal, sehingga terdirlah 3 (tiga) cabang kekuasaan, yaitu:¹⁸

- Cabang kekuasaan legislatif
Cabang kekuasaan ini merupakan kekuasaan untuk membuat sebuah undang-undang.
- Cabang kekuasaan eksekutif
Cabang kekuasaan ini merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- Cabang kekuasaan yudikatif
Cabang kekuasaan ini merupakan kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang.

Montesquieu juga menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak boleh bertumpu pada satu organ, tetapi harus dipisahkan organ yang satu dengan organ yang lainnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Organ adalah bentuk atau wadah, sedangkan fungsi adalah isinya. Organ adalah status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan fungsi adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya.¹⁹

Menurut Hasan Zaini, fungsi, kedudukan, dan wewenang saling berkaitan. Fungsi sendiri dapat diartikan suatu lingkungan kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedudukan adalah suatu lembaga negara yang ditentukan oleh fungsinya. Untuk dapat menjalankan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan tertentu, lembaga negara harus dilengkapi dengan wewenang atau kekuasaan.²⁰

Menurut Bagir Manan wewenang adalah kekuasaan yang diberikan atau didapat berdasarkan hukum yang ekuivalen dengan authority. Dengan kata lain, konsep wewenang berbeda dengan konsep kekuasaan yang bisa didapatkan atas dasar hukum atau tidak berdasarkan hukum. Selain menjalankan fungsinya masing-masing, setiap organ juga harus dapat saling mengimbangi dan saling melakukan pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Hal tersebut diperlukan untuk dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan. Dengan demikian, kekuasaan dapat diatasi sesuai dengan fungsi dan dapat dikontrol baik secara internal oleh lembaga-lembaga lain yang sederajat, maupun secara eksternal oleh rakyat sebagai konstituen nyata yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara.²¹

Pemisahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi pemisahan kekuasaan secara material dan pemisahan kekuasaan secara formal. Pemisahan kekuasaan secara material adalah pemisahan kekuasaan yang dilakukan secara tegas dalam tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, serta

¹⁸ Kekuasaan itu meliputi fungsi, yaitu serangkaian kegiatan yang harus dilakukan, dan organ atau badan yang melaksanakan kegiatan tersebut. Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Op.Cit., hlm. 105.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 115

²⁰ Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 261.

²¹ Hendra Nurtjahjo, "Kedudukan Bank Sentral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945", dalam Jurnal Konstitusi (Volume 4 Nomor 4, Desember 2007): 111.

yudikatif. Pemisahan kekuasaan secara formal adalah pemisahan kekuasaan yang tidak dilakukan secara tegas.²²

Pada dasarnya ada 3 (tiga) pengertian dalam Pembatasan kekuasaan dengan sistem konstitusionalisme, yaitu:²³

- Pertama, suatu negara atau setiap sistem pemerintahan harus didasarkan atas hukum, sementara kekuasaan yang digunakan di dalam negara harus dijalankan berdasarkan pada aturan dan prosedur hukum yang pasti.
- Kedua, struktur pemerintahan harus memastikan bahwa kekuasaan terletak pada cabang-cabang kekuasaan yang berbeda yang saling mengawasi dan mengimbangi.
- Ketiga, hubungan antara rakyat dan pemerintah harus diatur dengan cara sedemikian rupa dalam merencanakan hak-hak dasar dengan tidak mengurangi kebebasan individu. Kondisi tersebut melahirkan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda berdasarkan pilihan politik

Tujuan adanya lembaga-lembaga negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga harus dapat membentuk suatu kesatuan yang proses satu sama lain saling berhubungan dalam penyelenggaraan fungsi negara.

George Jellinek membagi lembaga negara berdasarkan kedudukannya menjadi 2 (dua), yaitu: pertama, lembaga negara yang langsung atau unmittelbare organ, yaitu lembaga negara yang menentukan ada atau tidak adanya negara. Dengan merujuk kepada teori Trias Politika, lembaga negara yang langsung tersebut adalah lembaga negara yang dimaksud oleh konstitusi, adalah lembaga negara yang melaksanakan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan yang kedua, Lembaga negara yang tidak langsung atau mittelbare organ, yaitu lembaga negara yang bergantung pada lembaga negara yang langsung.²⁴

²² Rofiqul-Umam Ahmad, ed., Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi, cetakan kedua, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2007) hlm. 76. Dalam tiga undang-undang dasar yang pernah berlaku dan digunakan di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950), doktrin Trias Politika tidak secara eksplisit dianut. Akan tetapi, ketiga undang-undang dasar tersebut, pada prinsipnya, menganut Trias Politika dalam arti pembagian kekuasaan dan UUD 1945 setelah empat perubahan menganut sistem pemisahan kekuasaan. Ibid.

²³ Moh. Mahfud MD, "Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita", Op.Cit.

²⁴ Achmad Roestandi, Op.Cit., hlm. 108.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Montesquieu juga menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak boleh bertumpu pada satu organ, tetapi harus dipisahkan organ yang satu dengan organ yang lainnya. Kedudukan adalah suatu lembaga negara yang ditentukan oleh fungsinya. Menurut Bagir Manan wewenang adalah kekuasaan yang diberikan atau didapat berdasarkan hukum yang ekuivalen dengan authority. Dengan kata lain, konsep wewenang berbeda dengan konsep kekuasaan yang bisa didapatkan atas dasar hukum atau tidak berdasarkan hukum.

Dengan demikian, kekuasaan dapat diatasi sesuai dengan fungsi dan dapat dikontrol baik secara internal oleh lembaga-lembaga lain yang sederajat, maupun secara eksternal oleh rakyat sebagai konstituen nyata yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara. Pemisahan kekuasaan secara material adalah pemisahan kekuasaan yang dilakukan secara tegas dalam tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Pemisahan kekuasaan secara formal adalah pemisahan kekuasaan yang tidak dilakukan secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Rajab, A. (2018). Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 531-552.
- Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- artikel. (2013). PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN. Retrieved July 4, 2021, from E-JURNAL website: <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-kewarganegaraan.html>
- Konstitusi, R. J. (2010). Riwayat Penulis dan Ketentuan Penulisan. *Jurnal Konstitusi*, 3(1).